Media : MEDIA INDONESIA
Tanggal : 18 MARET 2006
Hlm/klm : 15 /

Dunia Kesenian Jakarta

Kisruh tidak Pernah Berujung

'Melihat kekisruhan sistem pengelolaan di Pusat Kesenian Jakarta pasti akan sangat berpengaruh dalam hidup dan matinya kesenian.'

BIASANYA, ada dua alasan utama orang pergi ke Taman Ismail Marzuki (TIM); menonton atau ditonton dalam sebuah pertunjukan seni. Namun, ada yang berbeda Jumat pekan lalu. Sekelompok massa mendatangi TIM untuk berdemonstrasi. Mereka menuntut agar proses alih jabatan kepengurusan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2006-2009 berlangsung demokratis.

Massa berasal dari Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan tampak pula beberapa seniman dan budayawan seperti Ali Shahab, Ridwan Saidi, Hardi, Hidayat LPD, dan Oji Lirungan. Pelukis Hardi, bahkan mengatakan selama ini pemilihan sarat dengan nepotisme. Bulan Maret 2006 ini, masa kepengurusan DKJ periode 2003-2006 memang akan berakhir. Dan dari 110 anggota DKJ, ada 25 orang yang ikut uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Bagaimanapun juga, demonstrasi ini menjadi bagian dari sejarah perjalanan Dewan Kesenian Jakarta. Semuanya dimulai pada Mei 1968. Ketika itu Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Ali Sadikin mengundang para seniman Jakarta untuk membahas pembentukan suatu lembaga yang akan menangani pusat kegiatan kesenian di Jakarta. Ide itu sebenarnya tak baru karena pernah dilontarkan oleh sastrawan Trisno Sumarjo pada tahun 1950. Trisno juga yang akhirnya menjadi Ketua DKJ yang pertama.

Sebulan setelah pertemuan Mei 1968 itu, pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No Ib.3/2/19/1968 sebagai pedoman dasar pembentukan Dewan Kesenian Jakarta. Tugasnya untuk menangani pengendalian kegiatan di pusat kesenian yang akan dibentuk. Untuk penyuguhan kesenian ke masyarakat dibangun sebuah kompleks kesenian yang kemudian diberi nama Taman Ismail Marzuki. Sehingga pusat kesenian tersebut akhirnya dikenal dengan nama Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM).

Kemudian SK Tahun 1973 ini diperbaiki dengan SK Gubernur No D III-b.13/2935/73, yang menyangkut Pedoman Dasar Organisasi Pusat Kesenian Jakarta secara menyeluruh. Secara garis besar keduanya memang tidak jauh berbeda tetapi pasal yang memuat aturan tentang kewenangan DKJ yang berfungsi otonom serta bertugas menggariskan kebijakan dasar kesenian berubah. DKJ dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mempunyai hubungan horizontal dan harus saling berkomunikasi, terutama dalam masalah kesenian yang telah diolah oleh DKJ.

'Periode 1980-an inilah PKJ-TIM mengalami kemerosotan. Pembiayaan PKJ-TIM yang masih bergantung pada subsidi pemerintah DKI.'

Tahun 1986, keluar lagi SK Gubernur. SK ini membuat otonomi

DKJ berkurang karena dari segi administrasi, pengelolaan aset tidak lagi dilakukan oleh DKJ melainkan oleh Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki. Secara artistik PJK-TIM bertanggung jawab kepada DKJ, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian pada tahun 1991, semua SK yang berlaku untuk DKJ disempurnakan dengan keluarnya SK Gubernur DKI Jakarta No 148 Tahun 1991. Isinya mencakup semua peraturan mengenai Pusat Kesenian Jakarta, baik DKJ, Akademi Jakarta, Yayasan Kesenian Jakarta, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta dan TIM.

Sampai kepengurusan periode 2000-2002, SK Tahun 1991 dipakai sebagai dasar organisasi DKJ dan SK Tahun 1992 sebagai pedoman kerja. Lalu kepengurusan periode 2003-2006 diangkat berdasar ketentuan baru SK No 828 Tahun 2005. Akan tetapi, para pengurus periode ini tidak mau tunduk kepada SK yang mengangkatnya. Apalagi pada SK terbaru No 106 Tahun 2004 yang jelas akan mengubah struktur, sistem kerja, peran DKJ, dan lembaga-lembaga lainnya. Penolakan terhadap ketentuan yang menjadi payung hukum pembentukan DKJ, sampai saat ini belum jelas. Pengurus DKJ periode tahun 2003-2006 tetap menggunakan SK tahun 1991 dan tahun 1992.

* * *

SEJAK awal, pembentukan organisasi-organisasi yang berupaya untuk mengurus kesenian selalu mendatangkan kerisauan. Menurut Radar Panca Dahana, pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin akhir tahun 1960-an sampai awal 1970-an kesenian Indonesia khususnya Jakarta Raya mengalami masa keemasan.

Ali Sadikin berprinsip kesenian harus diurus oleh ahlinya. Hal itu membuat kesenian di TIM berjalan dengan sehat. Ditandai dengan eksperimentasi artistik.

Dari taman pusat kesenian inilah lahir tokoh-tokoh pembaharu kesenian Indonesia modern. WS Rendra, Danarto, Putu Wijaya, Sutardji Calzoum Bachri, Sardono W Kusumo mengambil tempat kreatif bahkan proses kreasinya di kompleks ini. Saat itu PKJ-TIM tumbuh dengan semacam debirokratisasi.

Lahirnya SK Tahun 1986, PJK-TIM mengalami rebirokratisasi. Ditandai dengan masuknya PJK-TIM ke dalam birokrasi pemerintah daerah. PJK-TIM harus bertanggung jawab secara administratif langsung ke pemerintahan DKI Jakarta. Ini sangat membatasi kebebasan kreativitas seniman, yang kontraknya sewaktu-waktu dapat diputuskan sepihak tanpa adanya hukum yang melindunginya.

Periode 1980-an inilah PKJ-TIM mengalami kemerosotan. Pembiayaan PKJ-TIM yang masih bergantung pada subsidi pemerintah DKI.

Di satu sisi, saat itu tidak ada pihak lain yang membiayai PKJ-TIM. Di pihak lain, pemerintah DKI selalu dituduh ikut campur bahkan mendikte masalah pembinaan. Tahun 1989 timbul gagasan untuk debirokratisasi kembali PKJ-TIM. Caranya dengan menswastakannya. Dan untuk mewujudkan gagasan ini dibentuklah Yayasan Kesenian Jakarta pada masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto.

Namun penambahan lembaga baru yakni Akademi Jakarta dan Yayasan Kesenian Jakarta memunculkan persoalan baru. Terjadi beda pendapat terutama menyangkut pembagian tugas di antara PKJ-TIM, DKJ, Akademi Jakarta, dan Yayasan Kesenian Jakarta.

Disebutkan dalam buku *25 Tahun TIM* gagasan dasar berdirinya organisasi Pusat Kesenian Jakarta bertumpu pada tiga lembaga; Yayasan Kesenian Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, dan Taman Ismail Marzuki. Setiap lembaga mengemban tugas yang jelas. Yayasan Kesenian Jakarta dalam hal pendanaan. Yayasan diharapkan dapat membantu Pemda DKI Jakarta dalam menyediakan dana untuk pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan PKJ-TIM.

Pemerintah Provinsi DKI sejak awal memang mengucurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan PJK-TIM. Dari mulai sebesar Rp2.090.500 pada tahun 1968-1969 sampai mencapai lebih Rp5 miliar pada tahun 2005-2006. Dana ini dibagi ke dalam tiga pos yaitu untuk pendanaan DKJ, IKJ (Institut Kesenian Jakarta) dan TIM. IKJ dalam kelembagaan PKJ-TIM bertugas mendidik dan menyiapkan potensi-potensi seniman masa depan. Selain itu yayasan juga diharapkan dapat memadukan berbagai aspirasi dari lembaga-lembaga kesenian (DKJ, TIM dan Akademi Jakarta) dan menyelaraskan hubungan tata kerja di antara mereka.

DKJ bertugas untuk menentukan kebijaksanaan pembinaan kesenian di wilayah DKI Jakarta. Tugas lainnya adalah menyusun program yang mendorong para seniman Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya agar lebih aktif mencipta dan melakukan eksperimen inovatif.

TIM bertugas menyuguhkan program-program yang telah disusun DKJ kepada masyarakat serta mengelola kegiatan dan fasilitas yang ada di kompleks PKJ-TIM secara profesional.

Akan tetapi dalam perkembangannya kerja dan wewenang dalam PKJ-TIM selalu mengalami pertentangan. Yayasan Kesenian Jakarta menurut DKJ kerap melampaui batas teritorialnya.

Melihat kekisruhan sistem pengelolaan di Pusat Kesenian Jakarta pasti akan sangat berpengaruh dalam hidup dan matinya kesenian. Apalagi juga dicampur dengan kepentingan pribadi dan golongan.

● **Dudi Herlianto**, *Litbang Media Group*

■ MEDIA/M IRFAN

UNJUK RASA SENIMAN: Sejumlah seniman tidak pernah berhenti memprotes Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Belakangan ini, para seniman mengkritik keberadaan DKJ yang dinilai tidak demokratis dan berbau KKN.